



# Meja Mewah Disudut Sekolah

## Modus Korupsi Lewat Pengadaan-pengadaan Siluman

JAKARTA — Sebuah ruang kelas di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 60 Jakarta Barat dipenuhi pelbagai alat canggih. Meja komputer yang bisa dilipat, papan tulisnya berupa monitor LED 42 inci, *in focus*, dan printer tiga dimensi. “Siapa yang mau menolak barang-barang bagus ini?” kata Sukadi, Wakil Kepala SMKN 60, kemarin.

Pelbagai pendukung kegiatan belajar-mengajar itu diterima Sukadi tahun lalu, tanpa mereka minta. Sukadi hanya tahu komputer itu merupakan bagian dari program *collaborative active classroom* (CAC) yang diadakan Dinas Pendidikan. Karena itu, sekolah-sekolah lain mendapat barang serupa. “Jarang digunakan karena guru belum berlatih mengoperasikannya,” kata Zulhelma, Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas 34.

Di SMK 35, alat-alat bantu belajar lebih futuristik. Ada pembuat label buku secara instan dan mesin sensor pendeteksi buku di perpustakaan. Masalahnya, kedua alat itu hanya terenggok di sudut ruangan karena tak berfungsi. “Kami tak tahu apa yang rusak,” kata Taufik Hidayat, guru di sana.

Guru-guru dan pejabat di sekolah-sekolah itu kompak menjawab bahwa mereka tak meminta alat-alat canggih tersebut ke Dinas Pendidikan. Sukadi bercerita, untuk barang-barang yang mereka ajukan, jumlahnya malah melebihi dari yang diminta. “Kami minta alat penyejuk ruangan 50, yang datang 74 unit,” katanya.

Menurut Firdaus Ilyas, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), barang-barang canggih dan berlebih itu adalah modus dalam proyek pengadaan di Dinas Pendidikan. ICW setidaknya menemukan ada Rp 1,2 triliun anggaran di dinas ini diselewengkan melalui pengadaan barang yang mubazir. “Sebagian besar dari proyek CAC ini,” katanya.

Ada dugaan bahwa penggelembungan tersebut merupakan bagian dari “pengadaan siluman” yang diungkap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Waktu itu Basuki menyoroti tentang pengadaan mesin penyimpan setrum (UPS) di sekolah dan kantor kelurahan. Menurut Basuki, pengadaan UPS itu bukan atas usulan pemakai, melainkan tiba-tiba muncul setelah anggarannya dicairkan.

Soal dugaan korupsi UPS ini, polisi telah menyidikannya dan menetapkan Alex Usman, mantan Kepala Seksi Sarana Dinas Pendidikan Jakarta Barat, sebagai tersangka. Polisi menduga ada penggelembungan harga Rp 50 miliar dari pembelian UPS sebesar Rp 280 miliar untuk 49 sekolah.

Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat juga terkejut ketika mengetahui banyak pengadaan yang tak masuk akal, terutama di Dinas Pendidikan. Ia, misalnya, menemukan lelang mata anggaran pembelian lemari anti-jamur untuk sekolah. “Itu lemari untuk apa?”

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Slamet Widodo, tak menanggapi dugaan penyelewengan anggaran tahun 2014 ini. Begitu juga Igo Ilham, Wakil Ketua Komisi Pendidikan 2009-2014, yang membahas anggarannya. Ia mengaku lupa dan, “Sekarang saya tak punya akses ke dokumen.” ●



Alat-alat fitness.



Papan tulis berupa monitor LED 42 inci.





*Uninterruptible power supply (UPS) di SMA 65 Jakarta.*



*Meja komputer yang bisa dilipat.*